

**TESIS**

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH POLRI**



**OLEH :**

**HERMAN FERANSISKUS ARITONANG  
NIM 201120251007**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2013**

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH POLRI**

OLEH :

**HERMAN FERANSISKUS ARITONANG  
NIM 201120251007**

**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH  
DISETUJUI PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2013**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. RM. Panggabean, SH., MH

Drs. Logan Siagian, MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Dr. Anton Wachidin Widjaja

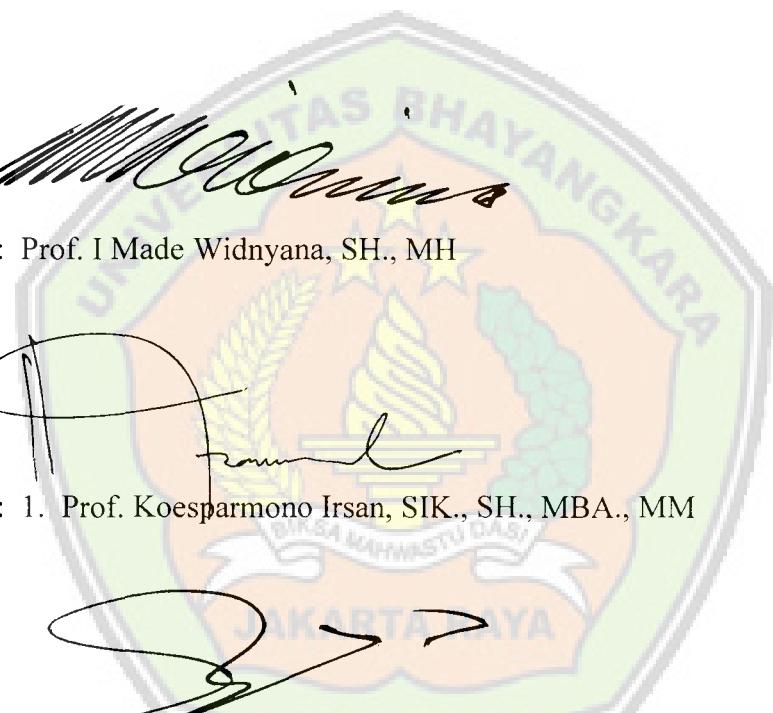
Tesis ini telah Diuji Pada  
Tanggal : 30 Agustus 2013

Panitia Penguji Tesis  
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Nomor : SKEP/004/VIII/2013/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

              2. Dr. RM. Panggabean, SH., MH

A faint watermark of the University of Bhayangkara Jakarta Raya logo is centered behind the signatures. The logo is a shield-shaped emblem with a green border containing the text 'UNIVERSITAS BHAYANGKARA' at the top and 'JAKARTA RAYA' at the bottom. Inside the shield is a yellow torch-like symbol above a blue banner, all surrounded by a green wreath.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN NO. 12967/D/T/K-III/2012

## PERSETUJUAN TESIS

NAMA : HERMAN FERANSISKUS ARITONANG  
NIM : 201120251007  
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA  
JUDUL TESIS : PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH POLRI



MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Polri adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**



NAMA : HERMAN FERANSISKUS ARITONANG  
NIM : 201120251007



## MOTTO:

Keadilan dan Penegakan Hukum dapat terlaksana jika terdapat Undang-Undang dan Aparat Penegak Hukum Yang Baik.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program magister hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua dan saudara saya yang telah mengantarkan saya menggapai cita-cita sampai detik ini dan seterusnya.
2. Bapak ANTON WAHIDIN WIDJAJA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH. Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak DR. RM. PANGGABEAN, M.H selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan sarannya.
5. Bapak Drs. LOGAN SIAGIAN, M.H selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan sarannya.
6. Kombes Pol. WINSTON TOMMY WATULIU, yang telah memberikan waktunya agar dapat di wawancara.
7. Kombes Pol. ALBERTUS RACHMAD WIBOWO, selaku Kasubdit IT & Cyber Crime.
8. Rekan-rekan pada Subdit IT & Cyber Crime terkhusus Dewi Maharani Purba, S.Pd, M.A yang telah banyak membantu penulis hingga selesaiinya tesis ini.

9. Calon isteri saya (Anggelina br. Tambunan) yang telah membantu dan memberikan support terhadap penulis hingga selesainya tesis ini.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Jakarta, 20 Agustus 2013

Penulis

(HERMAN FERANSISKUS ARITONANG)

## **ABSTRAK**

Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya perkembangan penggunaan Internet di seluruh dunia termasuk di Indonesia, dan mengakibatkan banyaknya tindak pidana yang dilakukan melalui fasilitas Internet. Saat ini statistik menunjukkan bahwa penggunaan internet pada akhir 2010 telah mencapai 1,9 miliar pengguna, sebagian besar berasal dari Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Demikian juga pengguna internet di Indonesia, telah berkembang dengan sangat cepat, bahkan telah menempati peringkat keempat di wilayah Asia dengan jumlah sebanyak 55 juta pengguna pada akhir Juni 2012, dan pertumbuhannya meningkat sebanyak 22,1% semenjak Tahun 2010. Untuk mencegah dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana *Cyber* maka Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum terkhusus Polri dalam mengimplementasikan UU ITE terhadap para pelaku tindak pidana *Cyber*, yaitu masalah prosedur yang terdapat di dalam Pasal 43 angka (3) dan (6) UU ITE yang berisi tentang penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan dan Penahanan, kemudian minimnya kuantitas dan kualitas penyidik di kepolisian yang menyebabkan banyak kasus tindak pidana *Cyber Crime* tidak tertangani. Dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang terkait dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana *Cyber Crime* seperti menggunakan undang-undang lain sebagai pelapis jika prosedur yang terdapat di dalam UU ITE tidak terpenuhi, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidik tindak pidana *Cyber Crime*.

Dalam penulisan tesis, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Yuridis normatif, tinjauan empiris. Pendekatan Yuridis yaitu dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya, dan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

## **ABSTRACT**

Internet use all over the world is increasing, including Indonesia. As a result, a lot of crimes are committed using the internet. Statistics show that in late of 2010 reached 1.9 billion users. The majority of internet users are from Asia, Europe and North America.

The number of internet users in Indonesia has developed even more rapidly than most nations. Indonesia is currently in 4<sup>th</sup> place in Asia with 55 million users in late 2012, an increase of 22.1% since 2010. The Indonesian government created the Electronic Transaction and Information Act (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) to prevent cybercrime and to fight against it.

Based on these facts, there are several challenges faced by law enforcement personnel, especially Indonesian National Police, in implementing the Electronic Transaction and Information Act to reduce cybercrime. There are procedural issues about searching, arresting and capturing cybercriminals as explained in Article 43 paragraphs (3) and (6). Additionally, the quantity and the quality of the police investigators are insufficient. As a result, there are many cybercrimes which are not currently being dealt with. Efforts have been made to overcome these obstacles including: supplementing the procedure in the Electronic Transaction and Information Act with an additional layer of law and enhancing the quantity and quality of the cybercrime investigators.

The writer of this thesis used the normative jurisdictional approach of research with an empirical objective. The jurisdictional approach is an approach that analyzes various laws. Normative means that research about law is aimed at obtaining normative knowledge about the relationship between one regulation and another, as well as their implementation in reality. The empirical approach is used to analyze the law's interaction with all aspects of the social life and behavioral patterns of the community.

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	9
1. Kerangka Teori .....	9
2. Kerangka Konseptual .....	16
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan perkembangan <i>Cyber Crime</i> .....	31
B. Perkembangan <i>Cyber Crime</i> di Indonesia .....	42

<b>BAB III KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UU ITE OLEH POLRI</b>	
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana UU ITE .....	59
B. Penyidikan dalam UU ITE .....	64
1. Penggeledahan dan Penyitaan sistem elektronik .....	67
2. Penangkapan dan Penahanan dalam UU ITE .....	70
<b>BAB IV TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM MENGATASI KENDALA PENEGAKAN TINDAK PIDANA UU ITE</b>	
A. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala dalam penegakan tindak pidana Cyber Crime .....	80
B. Analisa Putusan Pengadilan Nomor :1286/Pid.B /2012/PN.Bdg .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	101
<b>LAMPIRAN</b> .....	x
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	xi